

ANALISIS UPAH MINIMUM, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Pingkan Syabila Tri Indiati¹, Kiky Asmara², Fauzatul Laily Nisa³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

(21011010112@student.upnjatim.ac.id¹, kikyasmara25@gmail.com²,
f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id³)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo selama periode 2013–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda melalui bantuan perangkat lunak SPSS versi 27. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, artinya peningkatan upah minimum mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat pengangguran belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan jumlah penduduk miskin terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa semakin tinggi angka kemiskinan, semakin rendah kualitas pembangunan manusia. Model regresi yang digunakan memiliki nilai adjusted R² sebesar 97,3%, yang berarti bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 97,3% variasi dalam IPM Kabupaten Probolinggo. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan upah minimum dan penurunan angka kemiskinan merupakan strategi kunci dalam meningkatkan IPM. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memfokuskan kebijakan pada peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta perbaikan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia; Upah Minimum; Pengangguran Terbuka, Kemiskinan.

Abstract

This study aims to analyze the influence of minimum wage, open unemployment rate, and the number of poor people on the Human Development Index (HDI) in Probolinggo Regency during the period 2013–2023. A quantitative approach was employed, using multiple linear regression analysis with the assistance of SPSS version 27 software. The partial test results show that the minimum wage variable has a positive and significant effect on HDI, indicating that an increase in the minimum wage contributes to improving the quality of life. Meanwhile, the open unemployment rate has a negative but insignificant effect on HDI, suggesting that a lower unemployment rate does not necessarily reflect improved societal welfare. On the other hand, the



number of poor people has a negative and significant effect on HDI, meaning that higher poverty levels are associated with lower human development quality. The regression model used in this study has an adjusted R^2 value of 97.3%, indicating that the three independent variables collectively explain 97.3% of the variation in HDI in Probolinggo Regency. These findings highlight that increasing the minimum wage and reducing poverty are key strategies in enhancing human development. Therefore, local government policies should focus on improving household income, eradicating poverty, and enhancing access to and quality of education and healthcare services.

Keywords: Human Development Index; Minimum Wage; Open Unemployment; Poverty.

A. Pendahuluan

Pembangunan manusia sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan manusia dilakukan dengan baik dan optimal, maka sumber daya manusia akan berkembang dengan baik. Dengan begitu, setiap individu akan memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kemampuan bersaing yang lebih tinggi, sehingga mampu menghadapi perubahan dan tantangan di bidang sosial serta ekonomi. Pembangunan manusia adalah cara mengembangkan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan orang-orang, melalui partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembentukan kehidupan dan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendekatan ini lebih luas dibandingkan pendekatan lainnya, seperti pendekatan sumber daya manusia, pendekatan kebutuhan dasar, dan pendekatan kesejahteraan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggabungkan tiga dimensi utama pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak (Yektiningsih, 2020).

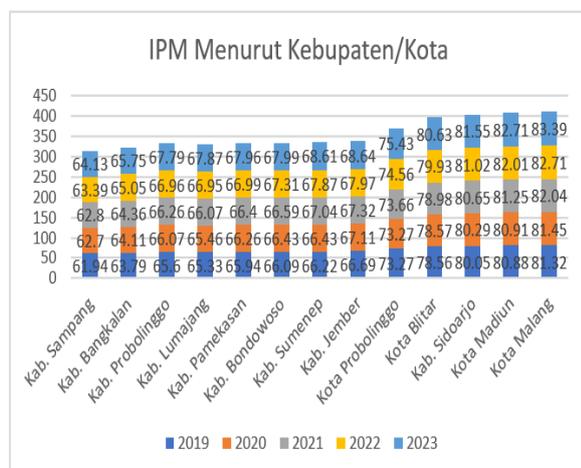
Semakin baik indikator pembangunan manusia pada daerah tersebut maka semakin baik juga SDM pada masyarakatnya. Indeks pembangunan manusia atau IPM memiliki fungsi sebagai tolak ukur apakah daerah tersebut sudah memiliki efektivitas pembangunan yang menyeluruh. UNDP merancang Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator yang mengukur kesejahteraan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Jika ketiga aspek utama tersebut dapat ditingkatkan, maka nilai IPM akan mengalami peningkatan. Nilai indeks pembangunan manusia yang tinggi merefleksikan keberhasilan suatu daerah dalam mencapai kemajuan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan (Bustamam et al., 2021)

Indikasi bahwa daerah dinegara tersebut sudah maju atau tidaknya terdapat pada kualitas pembangunan manusianya. Semakin baik indikator pembangunan manusia pada daerah tersebut maka semakin baik juga SDM pada masyarakatnya. Indeks pembangunan manusia atau IPM memiliki fungsi sebagai tolak ukur apakah daerah tersebut sudah



memiliki efektivitas pembangunan yang menyeluruh (Cahyani & Sishadiyati, 2022).

Grafik 1. IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa IPM beberapa Di daerah provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan pada setiap tahun. Akan tetapi, beberapa daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki IPM yang nilainya sangat rendah dari rata-rata IPM Provinsi. Salah satunya adalah Kabupaten Probolinggo. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya IPM Kabupaten Probolinggo adalah indeks pendidikan yang masih berada pada posisi ketiga terbawah di Jawa Timur. Hal ini mencerminkan adanya sejumlah permasalahan terkait kualitas dan akses pendidikan di daerah tersebut, termasuk rendahnya tingkat partisipasi sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai modal utama peningkatan kesejahteraan (Amdan & Sanjani, 2023). Kondisi ini mengindikasikan perlunya

upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan keterampilan. (Siswati & Hermawati, 2018).

Beberapa aspek ini memiliki keterkaitan yang terhubung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana salah satu hal yang berperan dalam meningkatkannya adalah upah minimum. Upah yang memadai dapat memperkuat daya beli masyarakat, memungkinkan mereka untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar dengan lebih baik. (Candrawati et al., 2021). Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang mereka peroleh. Upah yang diterima menjadi sumber utama penghasilan bagi individu. Jika terjadi peningkatan dalam jumlah pendapatan, hal ini secara langsung akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Faizin, 2021).

Grafik 2. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2023



Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo (data diolah)

Berdasarkan pada grafik diatas menunjukkan bahwa upah minimum dari

Kabupaten Probolinggo menempati urutan ke 11 tertinggi dari 38 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur.

Upah minimum Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 sebesar Rp2.753.265

tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Upah Minimum Kota Probolinggo yang sebesar Rp2.576.240. Kemudian daripada itu, kenaikan pendapatan juga dapat memajukan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas hidup serta Indeks Pembangunan Manusia. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan yang layak, yang pada gilirannya memperkuat kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan (Ashari & Athoillah, 2023).

Kemudian, pengangguran merupakan isu makroekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Masalah ini sering menjadi topik utama dalam salah satu masalah utama dalam masyarakat, di mana para pemangku kebijakan berupaya merumuskan strategi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai. Pengangguran terbuka sendiri merujuk pada bagian dari angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan atau dalam

proses mencari peluang kerja (Syadina Khumaerah, 2022).

Kabupaten Probolinggo ialah salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan TPT terendah ke-6 dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur, TPT adalah jumlah persentase pengangguran dibandingkan dengan total angkatan kerja yang mencerminkan sejauh mana tenaga kerja terserap dalam pasar kerja. Rendahnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan bahwa sejumlah besar angkatan kerja sudah mendapatkan pekerjaan. (Hasibuan, 2023).

Meskipun upah minimum yang tergolong relatif tinggi serta jumlah pengangguran yang rendah tidak menyangkal akan adanya kemiskinan pada kabupaten ini. Kemiskinan tidak hanya sekadar keterbatasan finansial atau rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya seperti kurangnya akses terhadap sumber daya, rendahnya kualitas kesehatan, minimnya tingkat pendidikan, ketidakadilan dalam sistem hukum, rentannya individu terhadap tindak kejahatan, serta ketidakmampuan dalam menghadapi tekanan kekuasaan. Selain itu, kemiskinan juga menghambat individu dalam mengambil keputusan dan menentukan arah hidupnya secara mandiri (Mononimbar et al., 2022).



Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo masih menempati urutan tertinggi ke-5 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dalam mengukur jumlah penduduk miskin di Indonesia dilakukan dengan menetapkan Garis Kemiskinan (GK) sebagai batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan (BPS, 2007).

Oleh karena itu, sejalan dengan (Faizin, 2021) bahwa upah minimum yang berlaku pada suatu daerah berpengaruh positif dan signifikan. Karena ketika upah minimum naik maka daya beli masyarakat juga mengalami kenaikan. Kemudian penelitian ini sejalan dengan penelitian (Alifah & Imaningsih, 2022) karena tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo, karena pengangguran di daerah Kabupaten Probolinggo cenderung rendah yang mempunyai artian bahwa meskipun banyak yang bekerja pada daerah tersebut akan tetapi masyarakat masih tidak bisa memenuhi kesejahteraannya. Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan (Alifah & Imaningsih, 2022) bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, jika kemiskinan semakin naik maka akan menurunkan indeks pembangunan manusia.

B. Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo tahun 2013-2023. Dengan menggunakan uji asumsi klasik (BLUE), analisis regresi linier berganda yaitu pengujian hipotesis dari uji F dan uji t dengan menggunakan program SPSS 27. Dan sumber data yang digunakan berasal dari BPS Jawa Timur dan BPS Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis mengenai suatu fenomena dengan mengumpulkan informasi yang bisa diukur menggunakan metode statistik, matematika, atau computer (Ghozali, 2018). Dengan pendekatan ini diharapkan hasil penelitian dapat bersifat objektif dan dapat bermanfaat dalam memahami pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo. Model yang digunakan dalam penelitian ini Adalah:

$$Y = a + b_1UM + b_2TPT + b_3JPM + e$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a = konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄, b₅ = koefisien regresi

UM = Upah Minimum

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

JPM = Jumlah Penduduk Miskin



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22758348
Most Extreme Differences	Absolute	.154
	Positive	.154
	Negative	-.132
Test Statistic		.154
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Sumber : Data Diolah, 2025

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hasil penelitian dikatakan berdistribusi normal atau memenuhi uji normalitas apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) variabel residual berada diatas 0.05 atau 5%. Sebaliknya apabila berada dibawah 0.05 atau 5% data tidak berdistribusi normal atau tidak memenuhi uji normalitas.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

b. Uji Heterokedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Nilai Probabilitas	Ketentuan	Keterangan
Upah Minimum	0.666	> 0.05	Tidak terjadi
Tingkat Pengangguran Terbuka	0.266	> 0.05	Tidak terjadi
Jumlah Penduduk Miskin	0.487	> 0.05	Tidak terjadi

Sumber : Data Diolah, 2025

Untuk uji heterokedastisitas menggunakan metode uji Glejser yang merupakan salah satu teknik dalam analisis regresi yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas, yaitu kondisi di mana varians dari residual tidak konstan pada setiap tingkat variabel independen.

Jika hasil regresi menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual (dilihat dari nilai signifikansi di bawah 0,05), maka dapat disimpulkan adanya heterokedastisitas. Sebaliknya, jika tidak signifikan, maka tidak ditemukan gejala heterokedastisitas

Dari hasil uji diatas menunjukkan bahwa variabel upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin tidak memiliki masalah heterokedastisitas karena nilainya > 0.05.

c. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Ketentuan	Keterangan
Upah Minimum	1.697	<10	Tidak Terjadi Multikolinieritas
TPT	1.700	<10	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Jumlah Penduduk Miskin	1.986	<10	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Output SPSS 27

Uji multikolinearitas berfungsi untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik



seharusnya tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen tersebut. Data dianggap tidak memiliki masalah multikolinearitas nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10.

Berdasarkan pada hasil pengujian diatas dibandingkan dengan nilai dan VIF. Diketahui bahwa nilai VIF 1.697 lebih kecil dari 10. Selanjutnya untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka nilai VIF 1.700 lebih kecil dari 10. Kemudian variabel Jumlah Penduduk Miskin menunjukkan nilai VIF 1.986 lebih kecil dari 10. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antar variabel tersebut.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 ^a	.981	.973	.272	2.008

Sumber: Data Diolah, 2025

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adakah kolerasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Untuk dapat mendeteksi adanya autokorelasi dalam situai tertentu memakai uji DurbinWatson dengan nilai keputusan nilai Durbin Watson diatas nilai DU dan kurang dari nilai 4-DU, $du < dw < 4-du$ dan dinyatakan tidak ada autokorelasi.

Berdasarkan tambel diatas nilai autokorelasi dengan uji durbin-watson yang menghasilkan nilai 2.008. Nilai ini

kemudian dibandingkan dengan tabel DW jumlah observasi 11 yang berasal dari jumlah variabel bebas 3 dan dengan tingkat signifikansi 0.05 dan diperoleh nilai dL 0.595 dan nilai dU sebesar 1.928, $4-dL$ sebesar 3.405, $4-dU$ sebesar 2.072. Nilai Durbin-Watson berada pada antara nilai dU yaitu $1.928 < 2.008 < 2.072$ atau $(dU < DW < 4-dU)$. Dari hasil yang didapat kemudian disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya autokorelasi.

2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang berguna untuk memastikan ada atau tidaknya pengaruh antar variabel terikat dan variabel bebas. Dan didapatkan persamaan berikut:

$$Y = 61.264 + 3.139UP + -0.268TPT + -7.714JPM$$

Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta = 61.264
 Semua unsur yang mempengaruhi IPM telah dijelaskan oleh nilai konstan tersebut, maka nilai Indeks Pembangunan Manusia mempunyai nilai 61.264 jika variabel bebasnya konstan.
2. Nilai koefisien regresi X1 yang mempunyai nilai 3.139 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan rupiah Upah Minimum (X1) akan menyebabkan kenaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebesar 3.139 poin dengan asumsi X2 dan X3 tetap.



3. Nilai koefisien regresi X2 menunjukkan nilai -0.268 dan menandakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) memiliki dampak negatif. Dalam hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 1% Tingkat Pengangguran Terbuka akan mengakibatkan penurunan sebesar -0.268 poin dalam Indeks Pembangunan Manusia (X2) dengan asumsi X1 dan X3 tetap.

4. Nilai koefisien regresi X3 menunjukkan nilai -7.714 dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk Miskin memiliki dampak negatif. Sehingga jika terjadi peningkatan 1 ribu jiwa dalam Jumlah Penduduk Miskin akan menyebabkan penurunan pada Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebesar -7.714 poin dengan asumsi X1 dan X2 tetap.

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji t

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a			
Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Upah Minimum	6,668	2,365	,000
Tingkat Pengangguran Terbuka	-1,060	2,365	,218
Jumlah Penduduk Miskin	-2,796	2,365	,027

Sumber : Data Diolah, 2025

Setelah melalui uji normalitas, selanjutnya data di uji dengan uji t yang bertujuan untuk uji-t digunakan untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variable terikat dengan $\alpha = 0,05$. Dengan ketentuan jika nilai sig. < 0,05 atau t-hitung

> t-tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, Jika nilai sig. > 0,05 atau t-hitung < t-tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5, maka Upah Minimum (X1) mempunyai nilai signifikan 0.000 atau kurang dari 0.05 dan t_{hitung} sebesar 6.668 atau lebih besar dari t_{tabel} 2.365. Dan dapat disimpulkan bahwa upah minimum (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) memiliki t_{hitung} sebesar -1.060 dan menunjukkan arah hubungan negatif. Dengan nilai t_{tabel} 2.365 maka pengukuran -1.060 kurang dari nilai t_{tabel}. Dan juga nilai signifikan 0.218 atau lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jumlah Penduduk Miskin (X3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2.796 sehingga menunjukkan arah negatif. Karena nilai t_{hitung} -2.786 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2.265 dan juga mempunyai nilai signifikan 0.027 atau lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

b. Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a			
	Model	F	Sig.
1	Regression	104.548	.000 ^b
	Residual		
	Total		



Sumber : Data Diolah, 2025

Dilanjutkan dengan uji F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan nilai prob F hitung dengan tingkat kesalahan alpha (0,05). Apabila nilai prob F hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob F hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi diestimasi tidak layak.

Dari hasil uji diatas menunjukkan bahwa nilai uji F diperoleh Fhitung 104.548 dan nilai probabilitasnya 0.000 sedangkan Ftabel (k-1, n-k) sebesar 4.07. dan dapat disimpulkan bahwa Fhitung 104.548 lebih besar dari Ftabel 4.07 serta nilai probabilitasnya 0.000 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 ^a	.981	.973	.272

Sumber : Data Diolah, 2025

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen dalam penelitian. Nilai koefisien determinan yang 88 mendekati 1 berarti variabel-variabel independent hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Hasil pengujian diatas menunjukkan nilai adjusted R^2 sebesar 0.973 atau sama dengan 97,3%. Oleh karena itu ditunjukkan variabel bebas (Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Miskin) sebesar 97,3%, sementara sisa yang lain tidak dijelaskan dalam kajian. Angka 97,3% menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil Pembahasan

a. Pengaruh Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel upah minimum secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo tahun 2013-2023. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan positif signifikan antara upah minimum dan IPM dimana setiap kenaikan upah minimum akan berdampak kepada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa



upah minimum memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Kabupaten Probolinggo.

Kenaikan upah minimum di Kabupaten Probolinggo merupakan hasil dari kombinasi antara kebijakan nasional dan dinamika perekonomian daerah. Berdasarkan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setiap tahunnya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Komponen-komponen tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan agar upah minimum dapat menyesuaikan dengan perkembangan harga barang dan jasa, sekaligus menjaga daya beli pekerja.

Selain faktor kebijakan nasional, kenaikan UMK di Kabupaten Probolinggo juga didorong oleh faktor lokal, seperti tingkat produktivitas tenaga kerja serta pertumbuhan sektor ekonomi daerah. Struktur perekonomian Kabupaten Probolinggo relatif beragam, meliputi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, hingga pariwisata. Peningkatan produktivitas di sektor-sektor tersebut mendorong terbentuknya nilai tambah perekonomian daerah yang pada gilirannya memberikan ruang bagi peningkatan upah minimum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan upah minimum di Kabupaten Probolinggo dipengaruhi oleh faktor makro (pertumbuhan ekonomi,

inflasi, dan KHL) serta faktor mikro (produktivitas tenaga kerja dan perkembangan sektor ekonomi daerah). Walaupun secara normatif kebijakan kenaikan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, realitas di Kabupaten Probolinggo memperlihatkan masih adanya tantangan berupa tingginya angka kemiskinan serta rendahnya capaian IPM

b. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo tahun 2013-2023. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada efek dari rendahnya tingkat pengangguran terbuka dapat menurunkan kesejahteraan manusia pada daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pengangguran terbuka dengan IPM di Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo pada bulan Agustus 2023, mayoritas orang yang bekerja di wilayah ini masih bekerja di sektor informal. Dari total jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 657.798 orang, hanya 196.458 orang atau sekitar 29,87 % yang bekerja di sektor formal seperti pegawai negeri sipil, karyawan perusahaan swasta, tenaga



pendidik, tenaga medis, serta pekerja di sektor manufaktur dan jasa, sedangkan sekitar 70,13 % bekerja di sektor informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Probolinggo didominasi oleh sektor pertanian khususnya subsektor pertanian tanaman pangan dan peternakan. Selain itu, sektor perdagangan juga menyerap banyak pekerja informal, seperti pedagang kaki lima, pedagang di pasar tradisional, serta usaha mikro lainnya. Pekerjaan di sektor informal tersebut biasanya memiliki tingkat perlindungan sosial dan jaminan kerja yang rendah, sehingga menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Probolinggo.

Hal ini tidak sejalan dengan teori Keynes, pengangguran terbuka terjadi karena rendahnya permintaan agregat yang membuat perusahaan mengurangi produksi dan mengurangi tenaga kerja. Akibatnya, pengangguran meningkat dan pendapatan masyarakat menurun. Namun, kondisi di Kabupaten Probolinggo berbeda, di mana tingkat pengangguran terbuka relatif rendah tetapi Indeks Pembangunan Manusia masih berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.

c. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

Kabupaten Probolinggo tahun 2013-2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pada variabel jumlah penduduk miskin akan mengakibatkan penurunan pada IPM. Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa terdapat hubungan negatif antara jumlah penduduk miskin terhadap IPM di Kabupaten Probolinggo.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain rendahnya kualitas pendidikan yang ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah yang masih di bawah rata-rata provinsi, keterbatasan akses serta mutu pelayanan kesehatan, dan dominasi lapangan kerja di sektor informal yang memberikan pendapatan tidak menentu. Selain itu, struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo yang masih didominasi oleh sektor pertanian dengan produktivitas rendah menyebabkan masyarakat rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti perubahan harga hasil pertanian dan keterbatasan lapangan kerja formal. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup masyarakat dan berimplikasi pada rendahnya capaian IPM di Kabupaten Probolinggo.

Apabila jumlah penduduk miskin meningkat terus menerus akan menyebabkan suatu permasalahan yang sangat kompleks. Dimana akan terlihat langsung dari pendapatan yang mereka dapat sehingga akan menurunkan permintaan dan investasi kemudian



berakibat pada produktivitas yang berkurang. Akan sulit mendapatkan pendidikan yang layak apabila terjebak dalam kemiskinan, penduduk miskin akan lebih mementingkan kebutuhan dasarnta seperti sandang, pangan dan papan. Mereka tidak akan menghabiskan dana untuk pendidikan dan kesehatan jika kebutuhan harian saja mereka tidak mampu untuk memenuhinya

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum di Kabupaten Probolinggo memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana kenaikan upah minimum dari tahun ke tahun diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kemudahan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi, sehingga turut mendorong peningkatan IPM. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM, yang disebabkan oleh dominasi sektor informal dalam struktur perekonomian daerah, terutama pertanian, serta rendahnya kualitas angkatan kerja yang mayoritas lulusan SD atau tidak bersekolah, sehingga perubahan tingkat pengangguran tidak berdampak signifikan pada pembangunan manusia di wilayah tersebut. Selain itu, Jumlah Penduduk Miskin memiliki pengaruh negatif dan

signifikan terhadap IPM, karena tingginya angka kemiskinan membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan produktivitas, sehingga pengurangan kemiskinan menjadi tidak hanya salah satu tujuan pembangunan tetapi juga syarat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan upah minimum dan pengurangan kemiskinan merupakan faktor kunci dalam mendorong pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo, sedangkan upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dan pengurangan ketergantungan pada sektor informal juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam strategi pembangunan daerah.

E. Daftar Pustaka

- Alifah, S. N., & Imaningsih, N. (2022). Analisis PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Modal dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap IPM di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 127–137. <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i2.404>
- Amdan, L., & Sanjani, M. R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 108–119. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2089>



- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 313–326. <https://doi.org/10.21776/jdessa.2023.02.2.08>
- BPS. (2007). *Statistik Pengangguran 2001-2006*. 1–100.
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Septiana Dewi, K. (2021). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAM*, 32(1), 85–92. [https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(1\).7677](https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(1).7677)
- Cahyani, D. A., & Sishadiyati. (2022). PENGARUH KEMISKINAN, PENGANGGURAN, UPAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PROBOLINGGO. 5, 28.
- Candrawati, M., Imaningsih, N., & Wijaya, R. S. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Harapan Hidup, Lama Sekolah dan Dependency Ratio Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kebumen 2010-2019. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 306–310. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2859>
- Faizin, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 214–227. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3027>
- Ghozali. (2018). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 25* (p. 490).
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis Pengaruh Ipm, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 53–62. <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/2075/1261>
- Mononimbar, T. Y., Lopian, A. L. C. P., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(3), 39–50.
- Siswati, E., & Hermawati, D. T. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2), 93–114. <https://doi.org/10.30742/jisa1822018531>



- Syadina Khumaerah, A. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten Pada Tahun 2018-2021. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(1), 111–122. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i1.284>
- Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2), 32–50. <https://doi.org/10.30742/jisa1822018528>

